

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negeri dengan kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam tersebut baik dari dalam perut bumi maupun dari luar perut bumi. Beberapa kekayaan dari dalam perut bumi misalnya gas maupun minyak serta bahan tambang lain. Untuk hasil alam dari luar perut bumi misalnya rotan, kayu, buah, serta, bunga. Salah satu bunga tanaman yang begitu menarik dan juga memiliki sejarah panjang di Indonesia salah satunya adalah cengkeh. Cengkeh berbentuk kerucut piramida dan memiliki cabang-cabang rapat daunnya kaku berwarna hijau serta berbunga di ujung rantingnya. Bunga Cengkeh pada awalnya banyak dimanfaatkan sebagai obat serta sebagai pelengkap upacara keagamaan dan pada awal abad ke-7 cengkeh mulai digunakan sebagai bahan campuran pembuatan rokok kretek.

Cengkeh di Indonesia mulai marak sejak negeri ini masih berupa kerajaan-kerajaan. Banyak saudagar Asia seperti dari Cina dan Timur Tengah datang untuk mendapatkan cengkeh. Pada masa tersebut pusat penghasil cengkeh di Indonesia adalah wilayah Maluku. Menurut Deinum Cengkeh berasal dari wilayah Maluku, tepatnya di kepulauan Ternate, Tidore, Motir, Makian, serta Halmahera. Bunga tanaman inilah yang juga kemudian menjadi primadona bagi bangsa Eropa. Bangsa Portugis berdatangan ke wilayah Maluku tahun 1511 M untuk berburu komoditas tersebut. Kemudian disusul oleh beberapa bangsa lain seperti Belanda, Spanyol, Inggris, dan Perancis.

Kemudian Bangsa yang paling banyak memainkan peran besar dalam memonopoli cengkeh adalah bangsa Belanda. Permainan perdagangan mereka diwakili VOC sebuah perusahaan dagang milik Belanda. VOC yang saat itu memegang perdagangan melakukan banyak usaha monopoli dalam perdagangan cengkeh. Monopoli tersebut dilakukan dikarenakan begitu berharganya bunga tanaman cengkeh. Peristiwa yang begitu terkenal dalam monopoli mereka ialah pelayaran Hongi, dimana banyak sekali pohon cengkeh dimusnahkan pada waktu itu.

Komoditas cengkeh mulai tidak terkenal di pasaran internasional pada awal abad ke-XIX. Cengkeh mulai tergeser dengan beberapa komoditi unggulan baru. Komoditas baru berupa tebu, tembakau, nila, serta kopi menjadi primadona baru sejak berakhirnya masa VOC menguasai perdagangan Indonesia.

Setelah VOC bubar di tahun 1800 Berbagai macam kebijakan pertanian kemudian banyak dimainkan oleh pemerintah Hindia Belanda secara langsung. Salah satunya adalah di tahun 1830 dicanangkannya *cultuur stelsel* atau kebijakan aturan penanaman. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor seperti kopi, the tebu, dan nila. Pada masa tanam paksa ini dari tahun 1833 hingga 1869 produksi tanaman perkebunan seperti gula mencapai 302,2 metrik ton dan untuk kopi mencapai 215 metrik ton. Kemudian di tahun 1870 hingga 1909 ketika undang-undang agraria di keluarkan dan membuat banyak perkebunan swasta muncul produksi perkebunan menjadi naik. Sisi menarik dari di sini adalah juga muncul perkebunan kecil milik rakyat. Pada periode ini produksi kopi

mencapai 259 metrik ton, gula mencapai 1.213,4 metrik ton, teh 19,4 metrik ton, tembakau mencapai 221,4 metrik ton, dan kulit kina mencapai 11,4 metrik ton. Adapun pada masa periode depresi dan perluasan penanaman di tahun 1910 hingga 1939 produksi tanaman-tanaman komoditas ini tetap stabil bahkan beberapa mengalami kenaikan. Kopi pada periode ini berproduksi mencapai 29,7 metrik ton, gula 5528,5 metrik ton, karet 500,1 metrik ton, teh 166,4 metrik ton, tembakau 330,6 metrik ton, kelapa sawit 156,6 metrik ton, kina 29,7 metrik ton. 4 Tanaman tanaman perkebunan ini terus menjadi primadona dan perhatian melupakan tanaman-tanaman lama yang pernah berjaya seperti lada cengkeh dan pala. cengkeh belum mampu menjadi komoditi yang menarik kembali.

Pasca kemerdekaan Indonesia cengkeh belum juga menjadi komoditi andalan lagi. Baru ketika pada masa pemerintahan Presiden Soeharto komoditas ini menjadi primadona kembali dalam kancah perdagangan komoditas pertanian. Pada periode tahun 1970-an hingga 1990-an cengkeh mengalami banyak pasang surut lagi dalam drama komoditas pertanian di Indonesia. Pada tahun 1970-an cengkeh masih harus diimpor dari luar negeri, hal ini dilakukan karena produksi dalam negeri belum mampu menyangga kebutuhan cengkeh dalam negeri. Apayang dilakukan pemerintah pada awalnya adalah dengan Program Repelita. Program ini disebut sebagai Intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman cengkeh guna menunjang swasembada cengkeh Nasional. Pada tahun 1970-an pemerintah menyebar luaskan benih cengkeh untuk mengamankan cengkeh dari ketergantungan impor yang mencapai rata-rata 8.000-10.000 ton pertahun. Cengkeh-cengkeh

luar negeri ini kebanyakan didatangkan dari Zanzibar kepulauan di wilayah Afrika

Kebutuhan akan pasokan bunga cengkeh mengalami peningkatan pada tahun sekitar 1970-1974 yang dari hanya sekitar 20.000 ton menjadi 34.000 ton. Peningkatan ini disebabkan adanya perkembangan inovasi dalam komposisi peracikan rokok di Indonesia. Sampai tahun 1974 tiap 1000 batang rokok kretek berisi 900 gram cengkeh dan meningkat pada tahun 1975 menjadi 1000 gram. Pada tahun 1977 racikan pada sebuah rokok kretek adalah 3:2 yang maksudnya adalah 3 ton tembakau dicampur dengan 2 ton cengkeh

Selain munculnya kebijakan seperti yang di atas, mengenai komoditas cengkeh masih ada kebijakan lain diantaranya adalah keputusan menteri pertanian tahun 1968 dan 1978 dimana adanya perintah peningkatan penanaman cengkeh di daerah yang cocok untuk ditanami komoditi cengkeh. Dari kebijakan tersebut luas lahan pertanian cengkeh Indonesia mengalami peningkatan dari 82.387 Ha menjadi 724.986 Ha di tahun 1990. Kebijakan pemerintah untuk cengkeh tidak hanya dalam perluasan lahan dan peningkatan produksi semata. Bahkan harga cengkeh sampai diatur dalam keputusan presiden No8/1980 dan dibentuklah Kerta Niaga sebagai badan penyangga. Kemudian untuk membantu menyangga dan mengatur pemasaran dibentuklah sebuah lembaga yang bernama BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) pada tahun 1992. BPPC yang kemudian akan sangat mempengaruhi dinamika pertanian cengkeh Nasional.

BPPC mengatur dan menentukan harga pasaran cengkeh nasional. BPPC terkadang menentukan harga begitu rendah sehingga membuat petani cengkeh merugi. Bahkan di penghujung tahun 1990-an muncul kembali peraturan pemerintah yang keluar. Kebijakan yang keluar adalah Kepres RI No. 20 Tahun 1992 dan menetapkan sepuluh provinsi pemasok cengkeh utama untuk pabrik rokok areal (PRK), yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara termasuk Gorontalo, dan Maluku. Selain pengaturan untuk pemenuhan pabrik rokok areal peraturan pemerintah juga dikeluarkan ketika cengkeh mengalami swasembada cengkeh bahkan terjadi kelebihan pasokan yaitu dikeluarkannya Inpres No. 14 tahun 1996 untuk mengkonversi tanaman cengkeh dengan tanaman lain.

Penggantian tanaman ini diharapkan dapat menstabilkan produksi cengkeh. Telah disebutkan di atas produsen cengkeh di Indonesia terdapat di beberapa wilayah diantaranya di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Jawa, dan lain-lain. Untuk wilayah Jawa penghasil cengkeh yang cukup banyak adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah ada kabupaten Wonosobo dan Karanganyar, sedangkan di Jawa Timur kabupaten penghasil cengkeh adalah Blitar, Tulungagung, Pacitan, Trenggalek dan Ponorogo. Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten yang pernah menyandang produsen pemasok untuk produksi cengkeh yaitu mencapai beberapa ton, Sedangkan kabupaten Ponorogo berada dibawah kabupaten Trenggalek.

Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah kabupaten di Jawa Timur bagian selatan no.2 dari Trenggalek yang wilayahnya 70 persen adalah

perbukitan. Suhu perbukitan yang cukup dingin menjadikan wilayah seperti ini cocok untuk dijadikan lokasi penanaman cengkeh. Pudak merupakan sebuah kecamatan di kabupaten Ponorogo yang terletak di Ponorogo bagian timur dan memiliki suhu sejuk hingga dingin serta tidak terlalu panas. Kondisi semacam ini menjadikan wilayah pudak terkenal di kabupaten Ponorogo sebagai sentra penghasil komoditi cengkeh. Tanaman cengkeh sendiri mulai marak di tanam oleh warga Pudak pada tahun 1970-an pada. Letak kecamatan pudak merupakan sebuah letak geografis cukup strategis sebagai penghasil cengkeh.

Seperti halnya masyarakat Pudak yang terletak di Srikaton Desa Banjarejo adalah petani cengkeh, secara garis besar produksi cengkeh merupakan salah satu tumpuan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Dukuh Srikaton Desa Banjarejo. Namun, lemahnya daya tawar petani mengakibatkan rendahnya kualitas hidup sehingga masyarakat tidak mampu bersaing dengan masyarakat petani lainnya. Masyarakat hanya mengandalkan nasib dan rejeki yang datang kepada mereka tanpa ada usaha lain. Persoalan pertanian selalu erat kaitannya dengan masalah hasil yang didapatkan. Kurang optimalnya hasil yang didapatkan masyarakat kurang mampu meningkatkan kesejahteraannya, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat.

Kegiatan pengoptimalan mengatasi permasalahan di atas berupa dibentuknya Kelompok tani Srikaton yang berangkat dari inisiatif masyarakat. Dari pembentukan kelompok petani tersebut diharapkan bisa memberikan solusi untuk para petani agar dapat meningkatkan sosial

ekonomi mereka. Dan tentunya bisa di jadikan sebagai tempat untuk belajar, mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang belum pernah mereka dapat. Departemen Pertanian (2009:11) memberikan kriteria baik atau buruknya kelompok tani didasarkan pada beberapa kriteria antara lain yaitu :

- a. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola usaha agribisnis.
- b. Memiliki kepengurusan yang aktif
- c. Dimiliki dan dikelola oleh petani, ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah petani yang berdomisili dilokasi.
- d. Dikukuhkan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Dibentuknya kelompok tani dapat menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat petani dalam pemenuhan kebutuhan. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai wadah mediasi terhadap kebijakan pemerintah seperti berbagai penyaluran bantuan yang dilaksanakan mulai dari Subsidi Sarana Produksi (SSP), Bantuan Modal Langsung (BML), simpan pinjam terhadap anggotanya, dan lain sebagainya yang jumlahnya sangat beragam.

Dukuh Srikaton Desa Banjarejo merupakan desa dengan mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian padahal secara geografis desa Banjarejo terletak di Bukit atau Dataran tinggi yang memiliki akses infrastruktur cukup sulit. Misalnya akses ke Dukuh Srikaton. Kondisi demikian menjadikan distribusi benih, pupuk sampai panen menghadapi kendala. Penyelesaian masalah menjadi sangat penting dilakukan dengan membentuk Kelompok tani Srikaton .

Pembentukan Kelompok tani Srikaton menerapkan sistem yang berlandaskan atas prinsip kepercayaan dan kebersamaan serta kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya secara maksimal. Selain itu juga memberikan pengetahuan pengelolaan Cengkeh yang unggulan sehingga produktifitas nilai jual hasil panen terkategori unggul. Untuk meningkatkan skala usaha dan peningkatan usaha secara komersial, Kelompok tani Srikaton dapat dikembangkan melalui kerjasama antar kelompok dengan membentuk Gapoktan. Secara prinsip, pemberdayaan petani menempatkan petani selain sebagai objek artinya sebagai sasaran dari masyarakat yang diorganisir dan juga sebagai subjek yang artinya Petani juga sebagai pelaku. Hal ini di perkuat oleh pernyataan dari bapak SUKARNI Adalah Kepala Desa Banjarejo, menyatakan bahwa:

“Dari satu desa banjarejo, ada 4 kelompok tani yang terbentuk namun hanya ada satu yang aktif sampai sekarang dan hanya satu kelompok tani yang bisa bekerja samadan bisa memajukan anggotanya yaitu kelompok tani srikaton mbak....

mengapa saya bisa mengatakan hal itu?? karena memang sudah terbukti kekompakan mereka dan Bantuan dari kami tidak serta merta hanya pengurus yang memakainya tetapi anggota kelompok tani pun yaitu Petani juga berhak untuk memakainya, jadi memang semua untuk pengurus dan juga anggota kelompok tan, selain itu kelompok tani srikaton ini juga masih aktif dalam melakukan pertemuan rutin setiap hari selasa Pon pada saat itu juga saya juga pasti diundang.” (Sukarni, tgl wawancara, 25 September 2016)

Pada prinsipnya, apabila sudah memiliki tingkat kemampuan yang tinggi dan telah mampu mengelola usaha tani secara komersial serta memerlukan bentuk badan hukum untuk mengembangkan usahanya, maka dapat ditingkatkan menjadi

bentuk organisasi formal yang berbadan hukum. Namun juga terdapat kelompok tani yang tidak berbadan hukum, pembentukan kelompok tani tersebut didasarkan dengan kesepakatan para anggotanya namun kelompok tani Srikaton memiliki Kedua prinsip seperti diatas.

Berbicara pemberdayaan Kelompok tani Srikaton lebih efektif karena didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat disadarkan atas potensi dan sumberdaya yang dimiliki sehingga mampu memberikan kontrol terhadap segala bentuk kepemilikan dan pengembangannya. Pemberdayaan dapat dipahami sebagai usaha untuk mengenali potensi yang dimiliki masyarakat melalui partisipasi masyarakat. Dengan partisipasi tersebut diharapkan muncul sebuah kesadaran kritis bahwa masyarakat memiliki segala daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Hal ini merupakan pendorong bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuannya sebagaimana yang disebutkan dalam UU No.11 pasal 1 ayat 1, tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi:

“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Menyikapi masalah tersebut, maka masyarakat tergerak dan berusaha mencari terobosan tersendiri dengan membentuk Kelompok tani Srikaton di Dukuh Srikaton Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Kelompok tani Srikaton yang terbentuk di Banjarejo memang secara kelembagaan sama dengan Kelompok Tani yang ada di desa lainnya berasas

dengan kelembagaan yaitu adanya susunan struktur kepengurusan seperti ketua kelompok, sekretaris, dan perangkat lainnya. Tetapi yang membedakan adalah adanya sistem yang dibangun sesuai budaya lokal masyarakat Dukuh Srikaton Desa Banjarejo seperti gotong royong, mekanisme musyawarah untuk membahas permasalahan di kebun cengkeh seperti pembibitan, penanaman, penanggulangan hama cengkeh, pemupukan, pemanenan dan juga pemasaran cengkeh dan adanya Arisan yang bergulir atau Anjongsana sebagai modal sosial dan sistem simpan pinjam yang didasarkan pada asas kekeluargaan.

Kelompok tani ini berusaha menjawab segala kebutuhan supaya meningkatkan pendapatan anggotanya, walaupun kelompok tani ini hanya bersifat sederhana, namun memiliki manfaat yang cukup besar dalam produksi pertanian cengkeh yang akhirnya mampu memberikan kontribusi dalam membantu kebutuhan anggota yang berada di naungan kelompok ini. Salah satunya seperti yang dilakukan Kelompok tani di Dukuh Srikaton Desa Banjarejo dengan memberikan bantuan kepada anggota dalam penyediaan kebutuhan dalam produksi cengkeh, seperti Pupuk, benih atau bibit cengkeh. Sedangkan bantuan ini merupakan salah satu kebutuhan utama yang menjadi penunjang selama ini dalam produksi menjalankan aktifitas Perkebunan cengkeh, kelompok ini sebagai pendampingan, fasilitator, pendidik dan perwakilan masyarakat, yang menghubungkan anggotanya dengan petani pemilik lahan dan juga petugas lapangan dari Pabrik sampoerna yang setia menjawab pertanyaan atau keluhan dari para petani cengkeh di Srikaton, simpan pinjam pengembalian dengan mekanisme pelunasan setelah selesai

panen raya. Sistem dan mekanisme pengelolaan semacam ini yang membedakan Kelompok tani Srikaton dengan kelompok tani yang lain.

Kelompok tani Srikaton yang berdiri di Dukuh Srikaton Desa Banjarejo merupakan salah satu hasil terobosan tersendiri di kalangan masyarakat setempat, sehingga pengelolaannya sangat sederhana. Personalia pengurus dan regenerasinya berlangsung secara demokratis layaknya organisasi modern. Dengan melakukan terobosan baru yaitu melakukan pembagian kerja untuk anggota kelompok tani Srikaton sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Keberadaan Kelompok tani Srikaton saat ini membantu petani yang tergabung dalam anggota kelompok tani ini untuk mengatasi kebutuhan anggota kelompok dalam hal meningkatkan usaha anggotanya dan penyaluran alat kebutuhan peningkatan produksi cengkeh. Kelompok tani Srikaton memberikan pendanaan terhadap semua anggota sebagai usaha produktif di Dukuh Srikaton Desa Banjarejo, mekanisme dengan peran Kelompok tani Srikaton ini berbeda dengan yang dilakukan di lain tempat. Di Dukuh Srikaton Desa Banjarejo pendanaan usaha produktif dilakukan melalui nilai-nilai yang berkembang di Dukuh Srikaton Desa Banjarejo seperti peminjaman pendanaan dengan asas kepercayaan sesama anggota. Terbukti dari keempat kelompok tani di Desa Banjarejo hanya Srikaton yang fair play dalam kegiatan simpan pinjam baik dari anggota ataupun pengurusnya. Sedangkan di kelompok tani lainya berbanding terbalik dengan Srikaton dalam urusan pendanaan atau simpan pinjam banyak yang tidak mau membayar / macet selain itu kurang proaktifnya antara pengurus dan

anggotanya lama kelamaan kelompok tani mati dengan sendirinya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti komitmen yang kuat dari agen pemberdaya dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani dalam usaha meningkatkan penyediaan peningkatan sosial ekonomi. Dengan fenomena tersebut, maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini yaitu **“Peran Kelompok Tani Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Dukuh Srikaton Desa Banjarejo Kecamatan Puduk”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis menguraikan rumusan masalah dibawah ini:

“Bagaimanakah peran kelompok tani dalam Peningkatkan sosial ekonomi masyarakat di Dukuh Srikaton Desa Banjarejo Kecamatan Puduk ?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

Tujuan penelitian merupakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah di kemukakan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

“Untuk mengetahui peran kelompok tani dalam Peningkatkan sosial ekonomi masyarakat di Dukuh Srikaton Desa Banjarejo Kecamatan Puduk.”

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan
- b. Diharapkan dapat memperkaya kepustakaan mengenai peran kelompok tani dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat petani pada suatu daerah tertentu, dan dapat menjadi perbandingan dengan daerah lain.

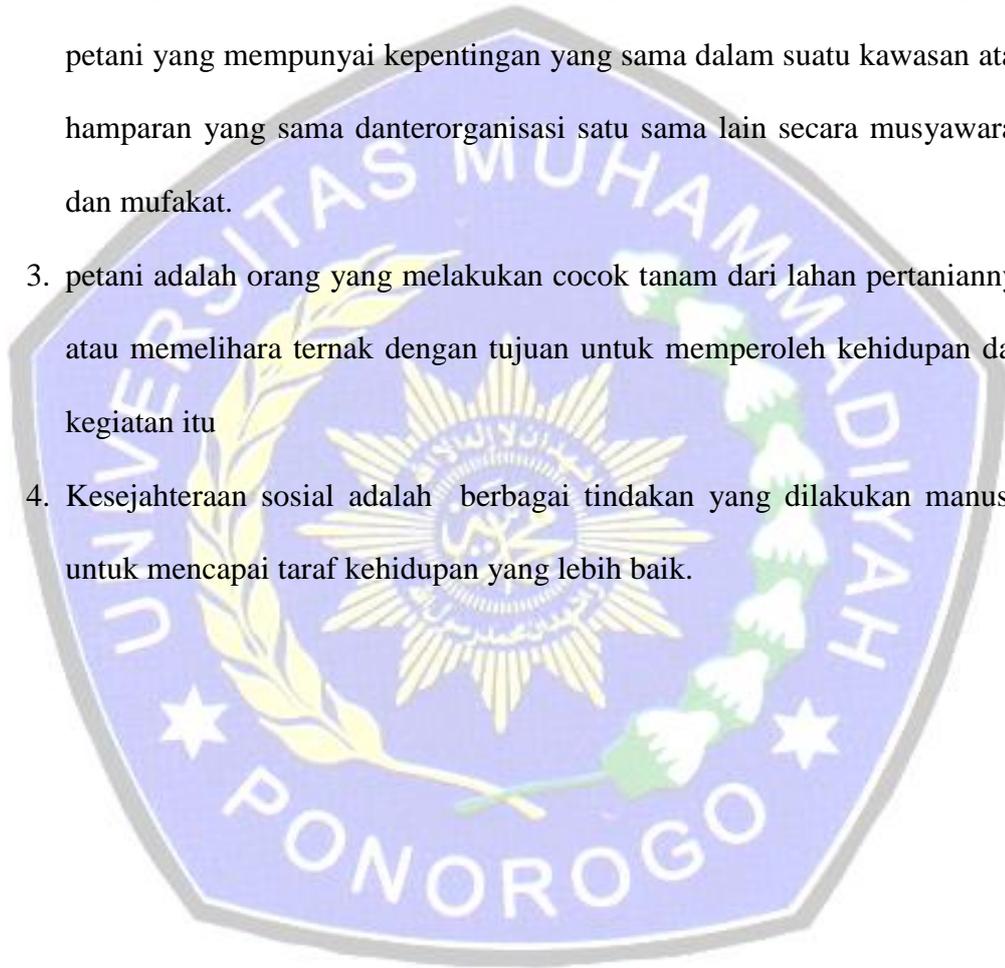
2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian peran kelompok tani dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat petani, maka hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih kepada petani agar mampu mengatasi problematikanya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini pula agar dapat memberi sumbangsih kepada dusun srikaton desa banjarejosupaya pemerintah lebih memperhatikan petani cengkeh yang ada di dusun tersebut.

E. Penegasan Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. peran adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
2. Kelompok tani adalah wadah sebagai tempat atau forum dari sekumpulan petani yang mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu kawasan atau hamparan yang sama dan terorganisasi satu sama lain secara musyawarah dan mufakat.
3. petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu
4. Kesejahteraan sosial adalah berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.



F. Landasan Teori

1. Pengertian Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1991:751), peran dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Sedangkan menurut Suhardono (1994:14) menjelaskan,

“Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang di duduki tidak sesuai dengan semestinya”.

Jadi peran seseorang dalam masyarakat di sesuaikan dengan kedudukan yang dimilikinya. Penjelasan di atas berusaha menjelaskan bagaimana seseorang mampu berperan dalam masyarakat hal ini tergantung kepada posisi yang dimilikinya. Terkait dengan peran Kelompok tani Srikaton desa Banjarejo yang begitu banyak memberikan perubahan dalam sisi kehidupan masyarakat Banjarejo khususnya kaum Petani, dimana Kelompok tani Srikaton berusaha memberikan pola hidup yang mandiri serta mampu memberikan solusi kepada setiap kebutuhan masyarakat, apa yang dilakukan oleh pihak Kelompok tani Srikaton tidaklah terlepas dari tugas seorang pekerja sosial, walaupun dalam hal ini orang-orang yang ada di Kelompok tani Srikaton bukanlah termasuk seorang pekerja sosial, akan tetapi peran yang dilakukan telah menggambarkan adanya proses pengembangan masyarakat. Brokensha dan Hogde (dalam Adi 2008:2001) mengatakan bahwa, “Pengembangan masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi dan inisiatif dari masyarakat”. Artinya pengembangan masyarakat merupakan

kegiatan yang terencana dalam membentuk dan merubah masyarakat dengan sistem partisipasi aktif dari masyarakat tersebut. Maka Kelompok tani Srikaton yang merupakan suatu lembaga dalam masyarakat dengan beberapa kegiatan yang dilakukan dan jika dikomparasikan dengan ilmu pemerintahan termasuk dalam intervensi makro, seperti yang dijelaskan oleh Netting dalam Adi (2008:34) “intervensi makro merupakan bentuk intervensi langsung yang di rancang dalam rangka melakukan perubahan secara terencana pada tingkat organisasi dan komunitas.” Masuknya kegiatan Kelompok tani Srikaton dalam tataran intervensi makro karena kegiatan yang dilakukan serta sasaran yang di tuju bukan pada tataran individu tetapi komunitas yaitu masyarakat Banjarejo pada khususnya Petani cengkeh.

2. Konsep Kelompok Tani

A. Pengertian Kelompok Tani

Departemen Pertanian (Deptan) memberikan definisi Kelompok tani adalah wadah sebagai tempat atau forum dari sekumpulan petani yang mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu kawasan atau hamparan yang sama dan terorganisasi satu sama lain secara musyawarah dan mufakat.

(<http://jakarta.litbang.deptan.go.id> diakses pada 17/08/201). Lebih lanjut Deptan merumuskan Azas kelompok tani dapat dilihat dari definisi tersebut, yaitu :

1. Kesamaan kepentingan

Dasar pembentukan kelompok tani adalah kesamaan kepentingan yang diwujudkan dalam suatu tujuan kelompok. Tujuan dan cara

pencapaiannya ditetapkan secara bersama-sama. Pembagian dan pendegelasan pencapaian tujuan diwujudkan dalam suatu kepengurusan kelompok yang disepakati bersama.

2. Kesamaan kawasan/hamparan usaha

Kesamaan ini akan memudahkan terjadinya komunikasi antar anggota. Intensitas komunikasi akan tinggi bila jarak dan jumlah anggota tidak besar, sehingga kekompakan kelompok dapat mudah terbentuk. Oleh karena itu jumlah anggota yang efisien antara 10 sampai dengan 25 orang.

3. Musyawarah dan mufakat

Prinsip ini merupakan fondasi dari kelompok tani dimana kepentingan setiap anggotanya diapresiasi. Segala keputusan berada di tangan para anggota yang dituangkan dalam suatu kesepakatan bersama.

Berbeda dengan dengan definisi Deptan, Mardikanto (1993) mengartikan “Kelompok tani sebagai kumpulan orang-orang tani atau yang terdiri dari petani dewasa (pria/wanita), (pemuda/pemudi) yang terikat secara formal dalam suatu wilayah keluarga atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.” Sedangkan Menurut Suhardiyono (1992) “Kelompok Tani biasanya dipimpin oleh seorang ketua kelompok, yang dipilih atas dasar musyawarah dan mufakat diantara anggota seperti Kelompok Tani Srikaton.”

Definisi baik dari Deptan maupun Mardikanto dan Suhardiyono (2009:56) secara substansi memiliki kesamaan yaitu adanya tujuan yang

sama, adanya struktur, serta adanya mekanisme kelompok yang disepakati bersama, yaitu sistem musyawarah. Menurut Samsudin (1993:24) bahwa “dalam suatu kelompok sosial seperti halnya Kelompok Tani Srikaton, selalu mempunyai apa yang disebut = *External Structure* dan *Internal Structure*.” Lebih lanjut, Samsudin menjelaskan bahwa *External Structure* dalam Kelompok Tani Srikaton adalah dinamika kelompok, yaitu aktivitas untuk menanggapi tugas yang timbul karena adanya tantangan lingkungan dan tantangan kebutuhan, antara lain termasuk tuntutan meningkatkan produktivitas usaha tani. Sedangkan *Internalstructure* adalah menyangkut norma atau pranata dan kewajiban dalam mencapai prestasi kelompok. *Internal structure* akan sekaligus merupakan dasar solidaritas kelompok, yang timbul dari adanya kesadaran setiap anggota Kelompok tani Srikaton yang bersangkutan. Kelompok tani Srikaton mempunyai solidaritas besar, di buktikan dengan adanya suatu ikatan persaudaraan yang di tandai dengan adanya acara pesta panen rakyat. Mereka bersama-sama bekerja sama membuat acara tersebut mulai dari dana hingga isi acara dan sebagainya. Jadi fungsi dan tugas darikelompok tani dan juga para Petani berjalan secara baik dan seimbang. Tidakada yang saling menjatuhkan juga tidak ada yang saling memanfaatkan. Semuadilakukan secara kekeluargaan dan melalui musyawarah bersama-sama.

B. Fungsi Kelompok Tani

Kelompok tani dalam konteks kesejahteraan sosial dilakukan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pokok petani. secara kelembagaan Kelompok tani mempunyai fungsi: sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang. Fungsi Kelompok tani antara lain sebagai berikut :

1. Kelas Belajar, wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera.
2. Wahana Kerjasama, untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. sehingga usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan,
3. Unit Produksi, Usaha tani yang dilaksanakan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas

Peraturan Menteri Pertanian, Nomor :273/Kpts/OT.160/4/2007, tanggal 13 April 2007, tentang “Pembinaan Kelembagaan Petani, proses kelembagaan Kelompok tani Srikaton terdapat fasilitator baik yang ditunjuk pemerintah maupun berasal dari masyarakat yang berfungsi sebagai pendamping.” Tahapan pengembangan masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan proses pendampingan sebagai fasilitator yang dapat melakukan transfer pengetahuan kepada masyarakat.

Pendampingan bisa melalui pemerintah maupun masyarakat yang di tunjuk atau di tugaskan sebagai fasilitator. Begitu juga dalam pengembangan Kelompok tani Srikaton yang juga disebut sebagai tenaga penyuluh. Merujuk pada pendapat, salah satunya Suharto (2009:95-97) yang menjelaskan “peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat yang didampinginya.”

1. Fasilitator

Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber, serta sebagai penghubung antara klien dengan sumber terkait.

2. Pendidik

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan *direktif* berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

3. Perwakilan masyarakat

Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.

Seperti yang telah di jelaskan di atas, Kelompok Tani Srikaton ini di bentuk dengan adanya tujuan dan fungsi untuk membantu para petani yang ada di dusun Srikaton desa Banjarejo kecamatan Pudak kabupaten Ponorogo yang memiliki kewajiban atau keharusan dalam meningkatkan produktifitas kebun cengkehnya. Dengan adanya kelompok tani Srikaton ini memberikan suatu jembatan bagi para petani untuk mendapatkan bibit, pupuk, pengendalian hama dan pemasaran dengan harga jual yang tinggi. Sehingga para petani tidak perlu khawatir dalam pemenuhan kebutuhan perkebunannya karena Kelompok Tani Srikaton sudah memberikan suatu pengetahuan, pembelajaran dan lain sebagainya untuk modal dan juga untuk memberikan kemudahan bagi para Petani supaya memiliki kemampuan dan bekal untuk meningkatkan produktifitasnya.

C. Pengembangan Masyarakat dan Pengorganisasian Masyarakat petani

Pengembangan masyarakat merupakan suatu metode dalam ilmu pemerintahan. Dimana kegiatan yang di lakukan membantu dan menolong masyarakat yang membutuhkan pertolongan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dunham dalam Adi (2001:149) berusaha menjelaskan pengembangan masyarakat sebagai berikut:

“berbagai upaya yang terorganisir yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat pedesaan, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga sukarela”.

Penjelasan di atas sesungguhnya suatu gambaran kegiatan pengembangan masyarakat. Dimana ada suatu rancangan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat melalui lembaga - lembaga yang terkait baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga sukarela yang memotori kegiatan tersebut.

Menurut Glen (dalam Adi: 2001:154-156) ada tiga unsur dasar yang menjadi ciri khas pendekatan pengembangan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Memampukan masyarakat untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan utama dalam pengembangan masyarakat adalah mengembangkan kemandirian dan pada dasarnya memantapkan rasa kebersamaan sebagai suatu komunitas berdasarkan basis ketetanggaan, meskipun bukan secara eksklusif. Dalam pendekatan ini pekerja sosial sebaiknya mendasarkan pada kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat untuk mengawali proses pembangunan.
2. Proses pelaksanaannya melibatkan kreatifitas dan kerjasama masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut
3. Untuk mencapai suatu hal yang diharapkan maka perlu adanya suatu kerjasama dan kreatifitas sebagai dasar proses pengembangan masyarakat yang baik. Pandangan yang melihat komunitas sebagai kelompok masyarakat yang secara potensial kreatif dan kooperatif merefleksikan idealisme sosial yang positif terhadap upaya-upaya kolaboratif dan pembentukan identitas komunitas.

Menurut Glen (dalam Adi: 2001:154-156) “praktisi yang menggunakan model intervensi ini (lebih banyak) menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat yang bersifat non-direktif.” Peran pekerja sosial dalam pendekatan ini lebih difokuskan untuk mempercepat perubahan (enabler), pembangkit semangat (encourager), dan sebagai pendidik

(educator). Disamping itu, dimana masyarakat yang pada umumnya cenderung bertindak sesuai dengan apa yang menjadi pilihan mereka, bukan bertindak dari pada apa yang telah diyakini benaroleh pekerja sosial yang seharusnya mereka lakukan. Dengan kondisi tersebut,pekerja sosial harus pandai berperan proaktif untuk mencari peluang agar bisa menyampaikan suatu hal yang sebenarnya pada saat individu ataupun kelompok sedang mengalami ketidak percayaan diri untuk mengorganisir kegiatan.

Menurut Adi (2001:244-258) tahapan yang biasa dilakukan dalam pengembangan masyarakat oleh beberapa organisasi pelayanan masyarakat, ialah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, tahap penyiapan petugas dilapangan. Berguna untuk menyamakan persepsi antar anggota tim agen perubahan dan metode apa yang akan digunakan dalam pengembangan masyarakat. Kedua, tahap penyiapan lapangan, petugas (community worker) pada awalnya melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran untuk dikembangkan, baik akan dilakukan secara formal maupun informal.

2. Tahap Assesment

Proses Assesment yang dilakukan disini dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan atau felt needs) ataupun kebutuhan yang diekspresikan dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Dan dalam tahap Assesment ini (penilaian) juga bisa digunakan metode SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman. Dalam proses Assesment ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agara mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar keluar dari mereka sendiri. disamping itu, pada tahap ini pelaku perubahan juga memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindak lanjuti pada tahap perencanaan.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas (community worker) secara partisipatif mencoba untuk melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

4. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahapan ini pelaku perubah membantu masing-masing kelompok untuk memformulasikan gagasan dalam bentuk tertulis, terutama yang ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana.

5. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan

Pada tahapan pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang telah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak adsa kerjasama antara petugas dan masyarakat, ataupun kerjasama antar warga.

6. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran, karena dipandang komunitas tersebut sudah mandiri danberhasil memecahkan masalahnya atau batas waktu yang ditentukan sudah selesai.

Pengembangan masyarakat ini dilakukan agar para buruh tani mendapatkan suatu pengajaran yang belum pernah mereka pelajari. Di sini kelompok tani menjadi fasilitator bagi para buruh tani untuk mendapatkan suatu informasi dan juga pembelajaran. Melalui tahap-tahap di atas akan mempermudah jalannya kegiatan yang akan di ikuti oleh para petani

3. Sosial Ekonomi

Kebanyakan negara sedang berkembang mengabaikan sektor pertanian untuk mendapat sumber daya dalam upaya meningkatkan usaha industrialisasi dan urbanisasi. Kebijakan ini sangat mengutamakan urban bias (kecenderungan mengutamakan kota) yang sudah mendarah daging dalam kehidupan ekonomi di kebanyakan negara sedang berkembang. Kebijakan yang berdasarkan Urban bias ini akan memperlebar jurang pendapatan antara kota dan desa. Banyak ahli di negara sedang berkembang dan di negara maju

sekarang beranggapan bahwa syarat penting lainnya yang belum terpenuhi adalah suatu daerah pedesaan yang lebih produktif.

Prinsip-prinsip Strategi Pembangunan Masyarakat Desa yang Mendasar Meskipun penekanan aspek-aspek tertentu mungkin berbeda dan masih disusunnya berbagai perincian yang lebih mendetil, sudah dicapai kesepakatan dalam banyak hal pada tahun-tahun terakhir ini mengenai prinsip-prinsip umum suatu strategi pembangunan masyarakat desa. Pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan merupakan tujuan umum. Peningkatan pendapatan kaum miskin di desa sama pentingnya dengan pertumbuhan ekonomi secara umum. Sektor pertanian harus mendapat prioritas paling tinggi. Sumber-sumber daya dan tenaga kerja trampil harus disalurkan ke dalam suatu usaha yang terus menerus untuk meningkatkan produksi pangan. Para petani kecil dapat menjadi kunci keberhasilan produksi pertanian jika mereka dapat memperoleh dengan biaya murah Land reform sering masih dibutuhkan untuk mendorong para petani agar meningkatkan penghasilan mereka. Land reform juga dapat menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan lebih merata di desa.

Prasarana pedesaan khususnya jalan raya, gudang penyimpanan cengkeh, harus dibangun agar petani dapat dengan menjual hasil-hasil mereka, sehingga dapat didistribusikan dengan kerugian yang minimum. Menghubungkan para petani dengan pasar adalah sangat penting. Lembaga-lembaga pemasaran, koperasi, dan keuangan yang melayani para petani harus didirikan pada lokasi yang tepat di pasar desa dan di kota-kota kecil. Sekolah

menengah dan sekolah teknik juga harus dibangun di sana. Industri kecil padat karya harus dikembangkan pada pusat ini untuk meningkatkan kesempatan kerja di samping menghasilkan barang-barang dan fasilitas pelayanan yang bermanfaat bagi petani. Dibutuhkan lebih banyak penelitian dan pengembangan mengenai teknologi yang menggunakan lebih banyak tenaga kerja secara efisien dan lebih sedikit modal di pertanian maupun industri kecil. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan harus terbuka bagi rakyat dari semua lapisan dalam bidang-bidang yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka, baik pada tingkat nasional maupun tingkat lokal.

Dalam pemberdayaan sosial ekonomi para petani, diharapkan partisipasi semua pihak baik Pemerintah dan petani itu sendiri. Untuk menjalankan kegiatan program kerja yang ditentukan Pemerintah disalurkan kepada para petani melalui kelompok tani. Penyuluh ini memberikan pendampingan kepada para petani yang menjadi anggota dalam suatu kelompok tani agar memudahkan pengawasan penyuluh pertanian, kemudian melalui kelompok tani inilah yang diberi wewenang untuk menyampaikan program kerja kepada para petani didesa-desa atau dukuh yang telah ditentukan.

4. Konsep Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pertanian memiliki arti yang sangat strategis, tidak hanya untuk negara-negara berkembang, bahkan untuk negara maju pun pertanian tetap mendapat perhatian dan perlindungan yang sangat serius. Membahas

tentang pertanian berarti membahas tentang kelangsungan hidup manusia di mana pertanian sebagai penyedia bahan pangan, bahan sandang dan bahkan bahan papan. Selama manusia di dunia masih memerlukan bahan pangan untuk menjamin kelangsungan hidupnya maka pertanian tetap akan memegang peran yang sangat penting. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital; penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan beenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa Negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan (Rahardjo, 2007:42)

Kesejahteraan sosial dalam arti yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental, dan segi kehidupan spiritual (Adi, 2008:44). Menurut Huda (dalam Sulistiati, 2004:25) kesejahteraan sosial adalah “keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya.” Di dalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya.

Di dalam Undang-undang kesejahteraan sosial tahun 2009 pasal 1 berbunyi “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Menurut Suharto (2005:2) kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsep yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
2. Institusi, area atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Perhatian pemerintah dan masyarakat secara umum terhadap perlunya standar kehidupan yang lebih baik telah mendorong terbentuknya berbagai usaha kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk mencapai kondisi standar kehidupan sosial yang lebih baik, diperlukan peran pemerintah karena pemerintah bertanggung jawab terhadap nasib kesejahteraan sosial warganya. Hal tersebut diperjelas dalam Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 4 bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial di Indonesia dikenal dengan nama pembangunan kesejahteraan sosial menurut Suharto (2005:4) menyatakan bahwa: “pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah, dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial”.

Pembangunan kesejahteraan sosial mengacu pada program, pelayanan, dan berbagai kegiatan menjawab kebutuhan ataupun masalah yang dihadapi anggota masyarakat. Semua itu dibutuhkan suatu usaha kesejahteraan sosial, dimana usaha kesejahteraan sosial itu sendiri, pada dasarnya merupakan suatu program ataupun kegiatan yang di desain secara konkrit untuk menjawab masalah kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup komunitas. Sedangkan Adi (2005:86) menyatakan, “usaha kesejahteraan sosial itu sendiri dapat ditujukan pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas, ataupun komunitas secara keseluruhan (baik komunitas lokal, regional, ataupun nasional).”

Friedlander (dalam Adi, 1994:3) mengemukakan pendapatnya bahwa “kesejahteraan sosial merupakan sistem yang teroganisir dari instansi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk memenuhi individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standart hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan.” Pendapat Wickenden (dalam Adi, 1994: 3) menguraikan bahwa “kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya adalah peraturan perundang-undangan, program, tunjangan dan pelayanan yang menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendasar dari masyarakat serta menjaga ketentraman dalam masyarakat.”

Pendapat Widanigsih (1997:5) tentang “keadaan keluarga sejahtera apabila telah mampu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial secara seimbang yang mencakup upaya untuk menyempurnakan dan mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera menuju kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.” Selanjutnya Sulastri (dalam Hartanto, 2006:25) menyatakan

“kesejahteraan keluarga adalah suatu keadaan yang menggambarkan kemajuan dan kesuksesan dalam hidup secara material, spiritual, dan sosial secara seimbang yang dapat menimbulkan ketentraman dan ketenangan hidup bagi keluarga sehingga dapat menyongsong kehidupan kedepan menjadi lebih baik.”

Kesejahteraan Sosial yang dimaksudkan oleh Midgley (1995:3) (dalam Adi, 2008,54) “adalah kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi sosial dan bukan sekadar kegiatan amal ataupun bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah.” Sebagai suatu kondisi (keadaan), kesejahteraan sosial dapat dilihat dari tiga unsur utamanya, yaitu: a. Tingkatan (derajat) sampai di mana permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat dikelola; b. Sampai seberapa banyak kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi; dan c. Sampai seberapa besar kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diperluas pada berbagai lapisan masyarakat.

Secara garis besar upaya masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok Petani merupakan bagian dari konsepsi kesejahteraan sosial yang menekankan masyarakat yang berdaya. Seperti dalam Kelompok Tani Srikaton desa Banjarejo, masyarakat berinisiatif dan berpartisipasi dengan kesadaran membentuk Kelompok Tani Srikaton. Kegiatan berhimpun selain dapat mentransfer teknologi satu sama lain antar petani juga menjadi mekanisme gotong royong dalam pemenuhan kebutuhan yang muaranya adalah kesejahteraan.

5. Pengertian Petani

Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah pertanian. Definisi petani menurut Anwas (1992:34) mengemukakan bahwa “petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu.” Sedangkan dalam pandangan Slamet (2000:18-19), “petani asli adalah petani yang memiliki tanah sendiri, bukan penyakap maupun penyewa.” Dalam artian konseptualisasi petani asli menunjukkan, bahwa tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan petani. Poin pentingnya bukan hanya terletak pada soal, bahwa tanah adalah alat produksi utama petani, melainkan bahwa alat produksi itu mutlak dimiliki petani. Sedangkan menurut Raharjo (2007:31) Implikasinya, petani yang tidak memiliki tanah sendiri tidak dianggap sebagai petani sejati atau asli. Implikasi politisnya, petani mutlak dan mempertahankan dan menjaga hak kepemilikannya atas tanah. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa konsep petani asli memiliki kaitan sosial-budaya-politik.

Dari panjar simatupang (2003:54) Pertanian (*agriculture*) bukan hanya merupakan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi petani saja. Lebih dari itu, petani adalah sebuah cara hidup (*way of life* atau *livelihood*) bagi sebagian besar petani. Oleh karena sektor dan sistem pertanian harus menempatkan subjek petani sebagai pelaku sektor pertanian secara utuh, tidak saja petani sebagai *homo economicus*, melainkan juga sebagai *homo socius* dan *homo religius*. Konsekuensi pandangan ini adalah dikaitkannya unsur-unsur nilai sosialbudayalokal, yang memuat aturan dan

pola hubungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya ke dalam kerangka paradigma pembangunan sistem pertanian secara menyeluruh.” Berkaitan dengan hal tersebut Slamet (2000:15), memberikan konsep “petani (*peasant*) agar dapat dioperasionalkan sesuai konteks Indonesia. Menurutnya, petani ditinjau dari proses perkembangan tingkat sosio-kultural masyarakat manusia, maka dapat dibagi dalam tiga ciri-ciri khusus.” *Pertama*, secara umum petani berada di antara masyarakat primitif dan kota (moderen). *Kedua*, petani adalah masyarakat yang hidup menetap dalam komunitas pedesaan. *Ketiga*, dipandang dari sudut tipe produksi, termasuk di dalamnya teknologi dan mata pencaharian, maka petani berada pada tahap transisi antara petani primitif dan petani moderen (*farmer*). Jadi, perbedaan antara petani *peasant* dengan *farmer* terletak pada sifat usaha tani yang dilakukan. *Peasant* berusaha tani dengan bantuan keluarga dan hasilnya juga untuk keluarga. Sedangkan petani *farmer* berusaha tani dengan bantuan tenaga Petani dan bertujuan mencari keuntungan. Produksi tidak hanya untuk keluarga, justru sebagian besar dijual ke pasar guna mendapatkan keuntungan.

Berbagai konsep petani tersebut, mengisyaratkan bahwa petani tidak lepas dari komunitas. Istilah komunitas pun mempunyai makna beragam, setiap segi-segi pengertiannya mempunyai arti yang sama penting. Redfield (dalam Slamet 2000:24) mengatakan bahwa, umumnya antropolog memandang komunitas dari sudut pandang ekologis. Dari sudut pandang ini komunitas di definisikan sebagai satuan sosial yang utuh dan terikat pada sistem ekologi yang bulat. Keterikatan pada tempat ini kemudian dikenal dengan sebutan kesatuan hidup setempat, yaitu yang lebih terikat pada ikatan

tempat kehidupan daripada ikatan lain seperti kekerabatan, kepercayaan dan sejenisnya.

Sedangkan menurut pandangan Raharjo (2007:145-146) kaum petani dapat digolongkan menjadi beberapa bagian berdasarkan pola pemilikan dan penguasaan tanah, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik penggarap murni, yakni petani yang hanya menggarap tanah miliknya sendiri,
2. Penyewa dan penyakap murni, yakni mereka yang tidak memiliki tanah tetapi menguasai tanah garapan melalui sewa atau bagi hasil,
3. Pemilik penyewa dan atau pemilik penyakap, yakni petani yang di samping menggarap tanahnya sendiri, juga menggarap tanah milik orang lain lewat persewaan atau bagi hasil,
4. Pemilik bukan penggarap, yakni petani yang bila tanahnya disewakan atau disakapkan kepada orang lain dan
5. Petani tunakisma atau Petani.

Melihat dari beberapa definisi tentang *peasant* dan *farmer* di atas dapat dibedakan, bahwa *peasant* merupakan petani yang tidak mempunyai lahan garapan (petani tunakisma), sedangkan *farmer* adalah petani pemilik lahan. Terkait dengan penelitian ini, dalam pertanian tanamancangkeh juga terdapat petani pemilik lahan (*farmer*) yang hanya mengontrol penggarap lahannya dan mencari pemasaran hasil pertanian cengkehnya. Selain itu, ada juga penggarap/Petani (*peasant*) yang bertugas mengelola lahan perkebunannya.

Mayoritas petani tinggal di daerah pedesaan, di mana pola kehidupan masyarakatnya merupakan hasil interaksi dari berbagai kultur yang mata

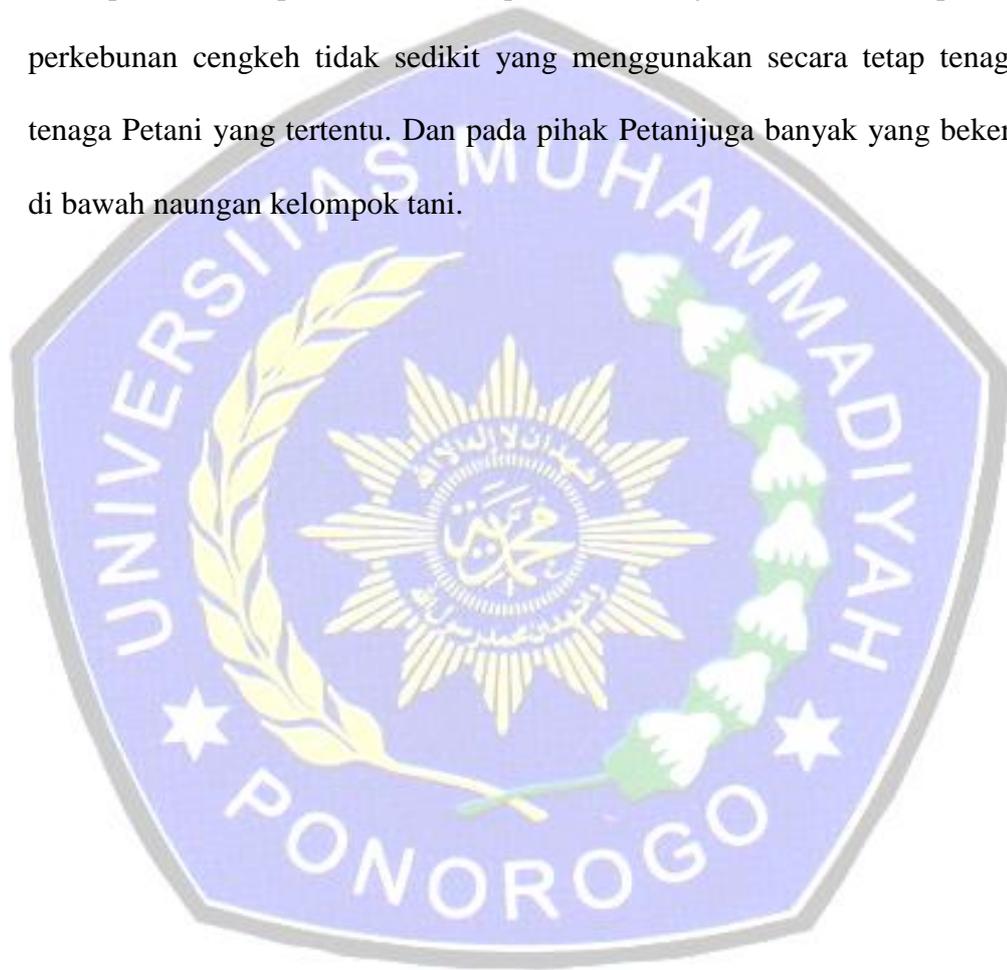
pencapaian masyarakatnya sebagian besar berkuat pada pertanian atau agraris. Pedesaan merupakan suatu wilayah, di mana terdapat bentuk-bentuk kehidupan bersama yang disatu pihak merupakan bagian daripada suatu kultur yang di dalamnya termasuk juga kota-kota, namun yang dilain pihak karena tergantungnya pada produksi agraris yang sepihak merupakan sub kultur yang jauh kurang berkembang daripada di kota-kota (Murdikanto. 1993:45).

Wolf, E. 1985 (1985:15) pada dasarnya dunia petani merupakan “suatu dunia yang teratur, memiliki bentuk-bentuk organisasi khas meskipun tidak tampak dari tingkat atas tatanan sosial.” Perbedaan masyarakat petani dengan masyarakat non petani adalah masyarakat petani sebagai entitas yang memiliki struktur dan kultur yang khas. Sedangkan menurut R Wolf. (1985:22) melihat petani dengan ciri, yaitu “mereka yang memandang aktivitas pertanian sebagai sumber mata pencaharian dan cara kehidupan, bukan sebagai usaha untuk mencari keuntungan.” Sedangkan menurut pandangan Scott (1993:35) memandang masyarakat petani sebagai.

”masyarakat yang memiliki kesamaan dengan tipe masyarakat lain, baik di dunia barat maupun timur. Kesamaan tersebut dalam hal: (1) adanya ikatan pribadi dengan tanah (2) keterikatan pada desa atau komunitas lokal (3) pentingnya keluarga secara sentral (4) perkawinan sebagai persiapan kecukupan ekonomi menuju makmur dan (5) adanya ketegangan antara keterikatan kepada tanah dan dunia lokal dengan keharusan menghasilkan tanaman penghasil uang.”

Dari uraian tentang karakteristik petani di atas dapat diperoleh gambaran, bahwa dalam pertanian terdapat organisasi khas dengan menganut sistem kekeluargaan pada komunitas lokal demi kemajuan bersama. Disamping adanya tenaga Petani, memang terdapat petani-petani yang

menggunakan tenaga Petani untuk mengerjakan sawahnya. Pada prinsipnya hubungan antara Petani dan kelompok tani mempunyai keterikatan kepercayaan, yaitu pihak Petani mau bekerja di bawah siapa saja yang membutuhkan tenaganya dan kelompok tani memberikan kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan menggunakan buruh siapa saja yang mencari kerja kelompok tani berperan. Akan tetapi, dalam kenyataan, di antara pemilik perkebunan cengkeh tidak sedikit yang menggunakan secara tetap tenaga-tenaga Petani yang tertentu. Dan pada pihak Petanijuga banyak yang bekerja di bawah naungan kelompok tani.



G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Meleong (2004:3) Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan informasi diskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sedangkan Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif. Menurut Faisal (1990:20) menyatakan bahwa penelitian diskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan sejumlah gejala atau kejadian yang berkenaan dengan, masalah atau unit yang diteliti, sejenis penelitian seperti ini tidak sampai mempersoalkan hubungan antara gejala atau kejadian yang ada, tidak bermaksud untuk menarik generalisasi yang menjelaskan gejala atau kejadian.

Sejalan dengan pendapat di atas Singarimbun (1995:19-20) berpendapat penelitian diskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Penelitian ini biasanya dilakukan tanpa hipotesa walaupun ada kalanya menggunakan hipotesa tetapi bukan untuk diuji secara statistik.

Menurut pandangan beberapa para ahli di atas, bahwa penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan fenomena sosial secara utuh dan terperinci tanpa harus mengubah adanya berbagai fenomena yang terjadi, serta tanpa adanya menghubungkan antara variable, sehingga bentuk yang dihasilkan hanya bersifat deskriptif sehingga menghindari adanya hipotesa dalam penelitian ini. Peneliti memiliki harapan yang besar bahwa paradigam

dan tipe penelitian yang digunakan ini nantinya menghasilkan data yang sesuai dengan yang diharapkan.

2. Jenis Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian, maka jenis penelitian dalam kajian ini adalah deskriptif karena peneliti ingin menggambarkan dan menceritakan penelitiannya dalam bentuk gambaran yang jelas dan mendalam terkait fenomena yang ada yaitu tentang Peran Kelompok Tani “Srikaton” dalam Meningkatkan social ekonomi Petani di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Tipe penelitian deskriptif menurut Moleong (2004:11) merupakan, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang berasal dari naskah wawancara, catatan, lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya dimana itu semua berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Metode deskriptif bertujuan untuk: mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada; mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku; membuat perbandingan atau evaluasi; menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Dengan demikian, metode deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, secara aktual dan cermat.

Metode ini menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat.

Peneliti hanya membuat kategori pelaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi. Dengan suasana alamiah berarti bahwa peneliti terjun ke lapangan. Peneliti tidak berusaha memanipulasi variabel. Karena kehadirannya, mungkin mempengaruhi gejala, peneliti harus berusaha memperkecil pengaruh tersebut (Hasan, 2002:22). Deskriptif mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi tempat penelitian dengan tujuan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan dan menggambarkan Peran Kelompok Tani “Srikaton” dalam Meningkatkan social ekonomi Petani di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo untuk menggambarkan dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Karena penulis ingin menggambarkan dan menceritakan penelitiannya dalam bentuk narasi.

3. Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Penentuan tempat penelitian memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Sehingga di butuhkan adanya ketepatan lokasi yang dipilih, dalam penelitian ini peneliti menggunakan purposive dalam menentukan lokasi penelitian, serta melihat secara utuh lokasi yang dipilih dan disesuaikan dengan fenomena yang terjadi. Maka dalam penelitian ini peneliti memilih Di Dukuh Srikaton Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian. Alasan memilih Desa Banjarejo di karenakan masyarakat sekitar banyak yang menggantungkan

kehidupannya pada agraria (pertanian), sedangkan para petani cengkeh sangat membutuhkan pupuk, obat hama secara mudah dalam pemenuhannya dan juga pemasaran yang pas dalam meningkatkan hasil cengkehnya. Disinilah ketertarikan peneliti untuk mengungkap lebih lanjut kondisi masyarakat Petani yang ada di Desa tersebut mengingat ada peran besar yang dilakukan oleh Kelompok tani Srikaton yang berhasil dalam meningkatkan social ekonomi petani di dukuh srikaton desa Banjarejo dalam menunjang dan meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat Petani dan keluarganya.

4. Metode Penentuan Informan

Informan merupakan ujung tombak dari kebenaran atau validasi dari sebuah makna yang peneliti cari kebenarannya. Informasi atau keterangan yang disampaikan oleh informan kepada peneliti akan menentukan capaian yang menjadi tujuan penelitian tersebut. Dengan kata lain ketika salah dalam menentukan informan, maka akan salah juga hasil dari sebuah penelitian tersebut. Meminimalisir terjadinya sebuah kesalahan dalam menentukan informan, maka peneliti mengantisipasi hal tersebut dengan metode atau cara penentuan informan secara disengaja melalui hasil penunjukan dari penyesuaian kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan fokus kajian penelitian tersebut. Atau metode tersebut secara ilmiah disebut dengan metode purposive. Menurut sugiyono (2010:53-54). Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, yaitu orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti.”Dalam penelitian ini terdapat dua macam informan yaitu informan pokok (primary informan) dan informan tambahan (sekunder informan).

Informan pokok merupakan orang yang menjadi sumber utama penyampaian informasi berupa data-data yang dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan proses kegiatan penelitian, dan yang bersangkutan terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Sedangkan informan tambahan ialah orang yang dapat menambahkan informasi atau data-data yang diperlukan oleh peneliti. Informan tambahan biasanya orang yang dianggap mengetahui tentang segala kejadian yang dialami oleh informan pokok.

Pada tahap pemilihan informan, Faisal (1990:56-57) memberikan kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Subyek yang telah cukup lama intensif dengan kegiatan atau medan aktifitas yang menjadi perhatian peneliti.
2. Subyek masih terlibat aktif atau penuh dengan lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.
3. Subyek yang memiliki cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas lebih dahulu.
5. Subyek yang sebelumnya terdapat masih asing dengan peneliti.

Mengacu pendapat dari Faisal di atas, maka peneliti menentukan kriteria Informan pokok dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pengurus inti Kelompok tani Srikaton yang ada aktif dalam melakukan pendampingan
2. Sudah lebih dari 2 tahun menjadi pengurus Kelompok Tani Srikaton

3. Bertempat tinggal di daerah tersebut
4. Selalu aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Srikaton Di Desa Banjarejo

Informan tambahan dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Anggota Kelompok tani Srikaton yang ada di Desa Banjarejo yang berstatus sebagai Petani.
2. Petani yang aktif dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Srikaton dalam menunjang kesejahteraan Petani.
3. Petani yang sering menjadi sasaran kegiatan Kelompok Tani Srikaton

Beberapa kriteria yang telah ditentukan diatas diharapkan mendapatkan informan yang tepat dan mampu menghasilkan informasi yang terjaga validitas data . Berikut data Petani Srikaton:

Tabel I. Informan Sekunder

No	Nama	Pekerjaan
1	RIYADI	Petani
2	TUMIJAN	Petani
3	SUMIJO	Petani
4	PALIL	Petani
5	MURDI	Petani
6	MARNO	Petani
7	IRUN	Petani

Data Sekunder Anggota Kelompok Tani Srikaton 2016

Data di atas di ambil dari 20 orang Petani yang tergabung dalam anggota Kelompok Tani Srikaton

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah proses kegiatan penelitian. sebab dalam metode ini, peneliti dituntut untuk menghimpun data yang telah didapatkan peneliti melalui proses penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, seperti: metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Pengumpulan Data Primer

1. Metode Observasi

Observasi merupakan alat untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti secara sengaja, sistematis, dan terstruktur mengenai fenomena atau kejadian secara nyata yang pada akhirnya dicatat untuk dijadikan sebuah fakta. Observasi tersebut dilakukan untuk dapat memperoleh sebuah keyakinan atas data yang didapat dari kenyataan yang ada. Senada dengan pendapat di atas, Menurut Faisal (dalam Sugiyono, 2010:64-67) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi partisipatif (participant observation), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt observation dan covert observation), dan observasi yang tak berstruktur (unstructured observation).

a. Observasi Partisipatif (participant observation)

Dalam observasi partisipatif ini, seorang peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipatif ini, maka data

yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Stainback(dalam Sugiono, 2010: 65) menyatakan dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. dalam observasi ini dibagi kembali menjadi empat, yaitu: (1). Partisipasi Pasif; peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. (2) Partisipasi Moderat; terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.(3)Partisipasi Aktif; peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh nara sumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap. (4) dan Partisipasi Lengkap; peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data. Jadi penelitiannya sudah natural, peneliti tidak terlihat melakukan penelitian. Hal ini merupakan keterlibatan tertinggi terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti.

b. Observasi Terus Terang (overt observation)

Seorang peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

c. Observasi Tak Berstruktur (unstructured observation)

Ialah penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Pada proses observasi ini, peneliti akan melakukan tahapan-tahapan pengamatan terhadap obyek yang akan diteliti melalui pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dan setelah peneliti melakukan pengamatan secara umum terkait masalah yang akan diteliti, maka langkah berikutnya yang akan peneliti lakukan ialah mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi fokus kajian, yang akhirnya akan membuat batasan-batasan objek pengamatan yang akan dilanjutkan dengan proses pencatatan.

Peneliti menggunakan observasi non partisipasi yaitu peneliti mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani Srikaton. Karena keikutsertaan hanya dilakukan pada saat penggalan data. Dari kegiatan rapat, kegiatan Petani, kegiatan lainnya yang biasanya kelompok tani Srikaton lakukan. Peneliti secara sengaja melakukan Penelitian secara terang dan terstruktur agar menciptakan suasana yang tidak kaku/leluasa dan terbuka antara peneliti dan para informan supaya tidak mengganggu mereka di kala kesibukan mereka.

2. Metode wawancara

Dalam proses kegiatan pencarian (hunting) data lapangan yang dilakukan peneliti tidak terlepas dari proses tanya jawab secara lisan dengan menggunakan bahasa verbal secara langsung ataupun melalui bantuan media lain antara peneliti (pencari data) dengan informan (pemberi informasi/data).

Dalam proses tanya jawab yang dilakukan peneliti dengan informan tersebut ialah proses wawancara.

Stainback (dalam Sugiyono, 2010:72) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Macam-macam wawancara/ interview:

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informan apa yang akan diperoleh.

2) Wawancara Semi terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

3) Wawancara Tak Berstruktur

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara tersebut akan dilakukan secara bertahap dan berulang-ulang oleh peneliti. Hal tersebut dilakukan agar terjadinya jalinan hubungan yang baik dan akrab antara peneliti dan informan, yang nantinya diharapkan berpengaruh untuk menunjang keakuratan informasi yang disampaikan oleh informan. Wawancara akan dilakukan ketika informan berkenan untuk diwawancarai dan yang bersangkutan sedang tidak memiliki aktivitas lain pada saat proses wawancara dilangsungkan. Terkait masalah pemilihan tempat dan waktu wawancara disesuaikan dengan kesepakatan peneliti dengan informan.

Dalam hal ini peneliti berencana untuk menggunakan dua panduan wawancara (interview guide). Dua panduan tersebut akan digunakan untuk informan pokok (primer) dan informan tambahan (sekunder). Artinya peneliti

akan membedakan panduan wawancara untuk informan pokok dan tambahan sesuai dengan substansi dan kapasitas yang bersangkutan. Wawancara ini dilakukan saat para informan bersedia dan menyempatkan waktunya untuk wawancara. Dengan begitu peneliti bisa menyiapkan panduan wawancara (interview guide) terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Wawancara bisa dilakukan di tempat perkumpulan kelompok tani Srikaton yang biasanya di gunakan, ada juga yang memakai Masjid untuk tempat wawancara, tempat kerja para petani dan rumah para petani/pengurus kelompok tani ini.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Metode tersebut merupakan bagian dari metode tambahan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan untuk menunjang dan menjelaskan data yang telah ditemukan peneliti dilapangan. Metode ini perlu digunakan mengingat banyaknya literatur yang harus dipahami dan dimengerti untuk menafsirkan, menguji bahkan meramal temuan-temuan baru yang peneliti dapatkan dilapangan, berupa dokumen-dokumen resmi yang dimiliki oleh lembaga atau instansi. Data-data tersebut seperti surat berdirinya kelompok tani Srikaton yang di syahkan oleh dinas pertanian, foto waktu melakukan observasi dan penelitian di lapangan, data-data anggota kelompok tani Srikaton, struktur organisasi dan juga rekaman wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan sebuah proses penafsiran atau pemahaman data-data yang peneliti peroleh dari lapangan dan kemudian disajikan dalam bentuk tulisan akhir. Analisis data dilakukan oleh peneliti semenjak peneliti turun kelapangan dalam proses kegiatan pengumpulan data. Analisa data merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh seorang peneliti setelah yang bersangkutan berhasil menghimpun data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitian tersebut. Faisal (1990:12) menerangkan bahwa metode analisa data pada penelitian kualitatif yaitu dengan jalan mengabstraksikan secara teliti setiap informasi yang diperoleh guna memperoleh kedalaman penghayatan terhadap interaksi atau konsep yang sedang dikaji secara empiris. Selanjutnya teknik analisa yang akan peneliti gunakan ialah teknik analisa domain dan taksonomi. Menurut Faisal (1990:90) analisa domain adalah analisa yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang mencakup fokus atau pokok permasalahan yang di teliti. Sedangkan analisa taksonomi adalah bentuk analisa data terhadap fokus penelitian yang diterapkan secara terbatas pada dimensi tertentu yang sangat spesifik guna mendiskripsikan tentang hal-hal yang menjadi perhatian peneliti.

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan sebuah proses kegiatan penelitian yang harus dilewati seorang peneliti. Proses keabsahan data memiliki tujuan untuk mendapatkan derajat kepercayaan (validitas) terkait data yang telah diperoleh sebelumnya oleh peneliti. Hal tersebut perlu dilakukan untuk

mendekatkan data pada sebuah kenyataan yang sebenarnya. karena pada hakikatnya informasi yang telah informan sampaikan pada peneliti belum tentu kebenaran dan kesamaan informasi yang informan lainnya juga sampaikan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Menurut Moleong (2004:178) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam Teknik triangulasi yang peneliti pilih ialah menggunakan teknik pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Langkah berikutnya yang akan dilakukan yaitu, peneliti berupaya untuk mengkomparasikan hasil informasi yang peneliti peroleh sebelumnya dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mengkroscek data yang telah diperoleh dari informan pokok dengan data dari informan tambahan. Hal ini dilakukan untuk membandingkan informasi yang bersebrangan dari sumber tersebut. Dan ketika ditemukan perbedaan informasi yang disampaikan oleh informan maka peneliti akan divalidkan dengan serangkaian teori-teori yang berkaitan. Dengan teknik tersebut, peneliti akan menemukan titik simpul alasan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan informasi yang disampaikan oleh informan. Sehingga kemungkinan besar peneliti akan bisa menyajikan data sesuai dengan faktanya/valid.

Menurut Moleong (2004:330), teknik triangulasi data dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balikderajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang beradab, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Pada triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan teori dinamakan penjelasan banding (rival explanation). Dalam hal ini, jika analisis telah menggunakan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau memperjelas pembandingan atau penyaing.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan mengcrosscek (cross check) data hasil wawancara dengan informan pokok yaitu pengurus kelompok tani Srikaton dengan informan tambahan anggota kelompok tani Srikaton yaitu Petani. Lalu membandingkan hasil pendapat dari pengurus dan anggota kelompok tani Srikaton dengan adanya peran kelompok tani ini. Dan terakhir membandingkan hasil wawancara dengan data-data yang ada, untuk selanjutnya didialogkan dengan teori dan konsep yang telah terbangun.